

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2014/2015

<https://s.ssel.bps.go.id>



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN***

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

2014/2015

<https://sjsel.bps.go.id>

**STATISTIK KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2014/2015**

ISBN :

Nomor Publikasi : 73542.0002

Katalog BPS : 7203007.73

Ukuran Buku : 29 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 43

Naskah : Bidang Distribusi

Gambar Kulit : Bidang Distribusi

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014/2015 merupakan hasil pengolahan dari Survei Keuangan Daerah Tingkat II (K2) yang dikumpulkan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari terbitan sebelumnya yang menyajikan data Realisasi penerimaan dan Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota tahun 2014, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota tahun 2015.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, Agustus 2016

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kepala,



NURSAM SALAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. SUMBER DATA.....	1
III. KONSEP DAN DEFINISI	1
IV. ULASAN SINGKAT.....	9
LAMPIRAN.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel A	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan TA 2013 – 2015	9
Tabel B	Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2014 – 2015.....	10
Tabel C	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2014 – 2015.....	11
Tabel D	Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan TA 2014 – 2015.....	12
Tabel E	Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Sulawesi Selatan Menurut Jenis Pengeluaran TA 2014 – 2015.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp)	15
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	16
Table 1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	17
Tabel 1.4	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	18
Tabel 1.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	19
Tabel 1.6	Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	20
Tabel 1.7	Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	21
Tabel 1.8	Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	22
Tabel 1.9	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	23
Tabel 1.10	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	24
Tabel 1.11	Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	25
Tabel 1.12	Realisasi Dana alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	26

Tabel 1.13	Realisasi Penerimaan Lain-Lain yang Sah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015 (000 Rp).....	27
Tabel 1.14	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	28
Tabel 2.1	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	29
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	30
Tabel 2.3	Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	31
Tabel 2.4	Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	32
Tabel 2.5	Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	33
Tabel 2.6	Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	34
Tabel 2.7	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	35
Tabel 2.8	Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	36
Tabel 2.9	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	37
Tabel 2.10	Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp).....	38
Tabel 2.11	Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	39

Tabel 2.12	Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	40
Tabel 2.13	Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	41
Tabel 2.14	Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawrsi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	42
Tabel 2.15	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015 (000 Rp)	43

I. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Hal ini terutama berkaitan dengan program otonomisasi daerah yang telah mulai diterapkan di berbagai daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus semakin efektif dan efisien. Untuk itu, statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota semakin diperlukan terutama untuk digunakan :

- 1) Sebagai bahan penghitungan PDRB neraca ekonomi baik tingkat daerah maupun PDB pada tingkat nasional, tabel input-output dan neraca arus dana.
- 2) Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana masing-masing daerah.
- 4) Sebagai informasi bagi pemerintah pusat untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.

II. SUMBER DATA

Data dalam publikasi ini diperoleh melalui Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- 1) Realisasi penerimaan daerah otonomi Kabupaten/Kota menurut sumber penerimaan selama tahun anggaran 2014 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
- 2) Realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota dirinci menurut jenis pengeluaran selama tahun anggaran 2014 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

III. KONSEP DAN DEFINISI

Daftar isian keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota. Konsep dan definisi tersebut sudah baku sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006. berikut ini beberapa penjelasan dan definisi dalam daftar isian K2.

PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan dana tersebut bertujuan untuk membiayai berbagai keperluan daerah yang bersangkutan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah,. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan c, parkir, dan lain-lain.

Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perijinan tertentu meliputi retribusi ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB), Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Waib pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai

pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Bunga

Adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi

Adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membiayai produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja Hibah

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Belanja Bantuan Sosial

Adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintha desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolahannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintha daerah pemberi bantuan.

Bantuan Keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan Keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

Belanja Tidak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah desa.

Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan pengadaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus

hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penertiban obligasi daerah yang direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Pembentukan Dana Cadangan

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

3. Pembayaran Pokok Utang

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

IV. ULASAN SINGKAT

Langkah dan upaya pemerintah dalam menggalakkan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten/Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah, yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel A. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013-2015.

Tahun	Realisasi (Juta Rp)	Perubahan (%)
2013	21.485.635	9,31
2014	24,864.779	15,73
2015	26,623.179	7,07

Provinsi Sulawesi Selatan selain sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama pertanian, pertambangan/penggalian dan pariwisata. Dengan letak geografis yang strategis dan dengan potensi alam yang dimiliki, program otonomisasi adalah menjadi suatu peluang untuk percepatan pembangunan daerah.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

4.1. PENERIMAAN / PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan daerah diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Peningkatan penerimaan daerah khususnya dari pos pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu hal yang harus terus diupayakan menuju terwujudnya otonomisasi daerah yang lebih nyata.

Tabel B. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2015 (000 Rp)

Uraian	2014	2015
A. Pendapatan Daerah	23,174,970,296	25,562,857,179
1. Pendapatan Asli Daerah	2,646,184,317	2,948,313,346
2. Dana Perimbangan	16,158,411,426	17,171,391,551
3. Lain-lain pendapatan yang sah	4,370,374,553	5,443,152,282
B. Pembiayaan Daerah	1.689.808.919	1.060.321.927
Total Penerimaan Daerah	24.864,779,215	26.623,179,106

Total penerimaan Pemerintah Daerah Se Provinsi Sulawesi Selatan selama tiga tahun anggaran terakhir secara riil terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2015 realisasi penerimaan sebesar 26.623.179 juta rupiah meningkat sebesar 7,07 persen dibanding keadaan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 diperoleh penerimaan sebesar 24.864.779 juta rupiah atau meningkat sebesar 15,73 persen dibanding total penerimaan pada tahun anggaran 2013 .

Secara umum, sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa jenis penerimaan, namun secara garis besar dapat dirinci dalam 3 kelompok sebagai berikut :

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

.Besarnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menggali potensi yang dimilikinya. Jumlah dan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut akan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri.

Tabel C. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2015 (000 Rp)

Uraian	2014	2015
1. Pajak Daerah	1,087,231,635	1,360,296,898
2. Retribusi Daerah	624,123,555	618,428,579
3. Laba usaha daerah	112,587,770	127,678,114
4. Lainnya	822,241,357	841,909,755
Pendapatan Asli Daerah	2,646,184,317	2,948,313,346

Pada tahun anggaran 2015, PAD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan adalah sebesar 2.948.313 juta rupiah, Dari jumlah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontributor utama, keduanya pada tahun anggaran 2015 menempatkan pajak daerah mencapai sebesar 1.360.296 juta rupiah (46 %) dari total PAD, dan retribusi daerah sebesar 618.428 juta rupiah (21 %) dari total PAD.

Bagian dari PAD yang menunjukkan kenaikan yang cukup besar adalah dari penerimaan lainnya yang naik sebesar 2,39 persen yaitu dari 822,241,357 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi 841,909,755 ribu rupiah pada tahun 2015.

4.1.2. Bagian Dana Perimbangan

Tabel D. Realisasi Penerimaan Bagian Dana Perimbangan Pemda Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Dirinci Menurut Jenis Penerimaan T.A. 2014-2015 (000 Rp)

Uraian	2014	2015
1. Bagi Hasil Pajak	588.254.966	631.500.836
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	141.938.481	175.101.712
3. Dana Alokasi Umum	13.972.903.719	14.684.900.693
4. Dana Alokasi Khusus	1.455.314.260	1.679.888.310
<i>Jumlah</i>	16.158.411.426	17.171.391.551

Penerimaan terbesar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berasal dari penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi, pada tahun anggaran 2014 sebesar 16,158,411.426 ribu rupiah menjadi 17,171,391.551 ribu rupiah pada tahun anggaran 2015 atau meningkat sebesar 6,27 persen. Kontribusinya terhadap total penerimaan, pada tahun anggaran 2014 sebesar 73,72 persen, dan pada tahun anggaran 2015 sebesar 73,65 persen.

Dari bagian Dana Perimbangan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi yang menunjukkan kenaikan yang sangat besar adalah dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 12,98 persen yaitu dari 1.795.508.096 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi 2.028.678.181 ribu rupiah pada tahun 2015.

4.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dibandingkan dengan keadaan pada tahun anggaran 2014, maka tahun anggaran 2015 kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap total penerimaan mengalami kenaikan sebesar 24,55 % yaitu dari 4,370,374.553 ribu rupiah pada tahun 2014 menjadi 5,443,152.282 ribu rupiah pada tahun 2015.

4.2 . PENGELUARAN DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedang format lama terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb.

**Tabel E. Realisasi Pengeluaran/Belanja Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan TA 2014-2015 (000 Rupiah)**

Uraian	2014	2015
1. Belanja Tidak Langsung	11.892.119.407	14.386.946.416
2. Belanja Langsung	10.584.611.566	12.118.469.111
3. Pembiayaan Daerah	2.388.048.242	117.763.579
Jumlah	24.864.779.215	26.623.179.106

Pada tahun anggaran 2015, total pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 26,623,179,106 ribu rupiah, dimana 14.386.946,416 ribu rupiah (54,04 persen) diantaranya adalah merupakan pengeluaran/belanja Tidak Langsung Daerah 12,118,469,111 ribu rupiah (45.52 persen) adalah pengeluaran/belanja langsung Pemda TK II se Sulawesi Selatan dan 117,763,579 ribu rupiah (0,44 persen) adalah Pembiayaan Daerah.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	717,495,469	732,028,690
2	Bulukumba	1,156,716,618	1,338,751,514
3	Bantaeng	631,217,547	683,522,948
4	Jeneponto	823,240,111	965,929,127
5	Takalar	936,386,154	911,306,497
6	Gowa	1,455,991,314	1,378,785,523
7	Sinjai	843,919,018	874,461,457
8	Maros	1,002,593,154	1,156,324,126
9	Pangkep	1,119,865,731	1,129,457,157
10	Barru	780,218,669	818,930,372
11	Bone	1,629,142,952	1,710,406,676
12	Soppeng	912,814,998	942,734,583
13	Wajo	1,255,067,683	1,237,023,406
14	Sidrap	822,005,896	1,061,279,869
15	Pinrang	1,062,579,802	1,043,892,404
16	Enrekang	758,072,895	868,334,286
17	Luwu	994,025,579	1,044,231,960
18	Tator	829,482,655	861,809,631
19	Luwu Timur*	1,180,547,937	1,267,033,582
20	Luwu Utara	906,984,528	1,021,448,023
21	Toraja Utara	726,465,743	751,271,304
22	Makassar	2,870,063,431	3,336,367,914
23	Pare-Pare	734,823,286	741,066,560
24	Palopo	715,058,045	746,781,497
Jumlah		24,864,779,215	26,623,179,106

Tabel 1.2..Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	670,219,100	722,528,690
2	Bulukumba	1,078,540,057	1,217,841,650
3	Bantaeng	624,129,081	683,522,948
4	Jeneponto	804,412,065	917,138,055
5	Takalar	863,221,657	908,306,497
6	Gowa	1,240,560,247	1,339,477,079
7	Sinjai	782,995,288	846,961,457
8	Maros	996,256,583	1,139,552,126
9	Pangkep	1,025,589,182	1,118,340,294
10	Barru	694,098,054	787,984,460
11	Bone	1,534,647,762	1,671,266,087
12	Soppeng	846,234,823	921,134,600
13	Wajo	1,103,893,523	1,174,395,635
14	Sidrap	820,880,885	1,028,359,173
15	Pinrang	996,369,785	1,043,892,404
16	Enrekang	734,573,695	802,671,826
17	Luwu	939,145,074	1,019,263,132
18	Tator	757,374,394	809,147,891
19	Luwu Timur*	1,003,602,954	1,113,896,600
20	Luwu Utara	891,587,139	999,688,016
21	Toraja Utara	720,114,937	744,920,498
22	Makassar	2,629,857,748	3,081,367,914
23	Pare-Pare	712,407,753	730,012,750
24	Palopo	704,258,510	741,187,397
Jumlah		23,174,970,296	25,562,857,179

Tabel 1.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	35,602,099	39,316,368
2	Bulukumba	89,616,626	109,700,000
3	Bantaeng	43,384,988	46,062,367
4	Jeneponto	46,032,160	64,000,146
5	Takalar	76,850,715	97,971,287
6	Gowa	149,352,696	131,694,496
7	Sinjai	46,404,260	26,063,336
8	Maros	118,267,910	149,045,200
9	Pangkep	129,209,744	125,362,452
10	Barru	45,076,357	47,016,014
11	Bone	155,427,196	143,285,007
12	Soppeng	60,544,221	58,056,189
13	Wajo	99,680,372	86,346,173
14	Sidrap	64,628,524	92,995,538
15	Pinrang	93,521,199	89,800,740
16	Enrekang	32,455,808	47,211,238
17	Luwu	64,132,445	57,382,326
18	Tator	82,506,083	69,458,314
19	Luwu Timur*	134,350,836	155,503,303
20	Luwu Utara	128,639,246	76,699,132
21	Toraja Utara	25,284,959	27,548,865
22	Makassar	731,170,425	992,147,612
23	Pare-Pare	112,395,774	114,781,555
24	Palopo	81,649,674	76,227,151
Jumlah		2,646,184,317	2,948,313,346

Tabel 1.4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	4,184,917	4,790,000
2	Bulukumba	20,141,318	25,682,579
3	Bantaeng	7,933,483	6,536,476
4	Jeneponto	8,728,179	11,581,200
5	Takalar	14,956,015	15,928,290
6	Gowa	63,143,326	61,825,635
7	Sinjai	9,318,073	8,714,000
8	Maros	57,503,300	64,201,000
9	Pangkep	71,703,862	68,585,110
10	Barru	8,700,952	8,670,000
11	Bone	36,277,176	32,178,841
12	Soppeng	10,417,526	9,591,100
13	Wajo	22,330,806	21,789,355
14	Sidrap	16,679,704	26,843,470
15	Pinrang	16,790,726	13,178,728
16	Enrekang	6,071,709	6,130,000
17	Luwu	13,488,085	11,430,000
18	Tator	6,516,318	4,980,454
19	Luwu Timur*	75,114,216	79,128,300
20	Luwu Utara	10,401,578	11,202,581
21	Toraja Utara	8,718,950	10,095,828
22	Makassar	561,697,248	822,081,993
23	Pare-Pare	19,907,390	19,148,780
24	Palopo	16,506,778	16,003,178
Jumlah		1,087,231,635	1,360,296,898

Tabel 1.5.. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	7,376,166	9,467,000
2	Bulukumba	10,591,173	13,636,600
3	Bantaeng	25,559,191	27,442,508
4	Jeneponto	26,651,809	37,475,146
5	Takalar	39,111,323	12,256,016
6	Gowa	53,159,809	42,953,041
7	Sinjai	7,124,641	6,219,254
8	Maros	39,363,461	58,644,200
9	Pangkep	36,256,449	37,719,734
10	Barru	15,922,304	12,911,437
11	Bone	15,378,571	15,005,988
12	Soppeng	9,553,788	9,574,863
13	Wajo	19,798,856	21,522,079
14	Sidrap	33,184,946	46,758,271
15	Pinrang	4,933,487	4,455,536
16	Enrekang	13,266,264	19,294,650
17	Luwu	28,787,203	28,337,696
18	Tator	59,960,987	50,381,825
19	Luwu Timur*	8,245,313	7,491,310
20	Luwu Utara	9,538,488	15,676,642
21	Toraja Utara	7,871,202	9,092,919
22	Makassar	135,918,535	115,273,184
23	Pare-Pare	10,280,547	12,851,380
24	Palopo	6,289,042	4,987,300
Jumlah		624,123,555	618,428,579

Tabel 1.6.. Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	7,587,079	7,945,000
2 Bulukumba	1,099,424	1,500,000
3 Bantaeng	4,378,741	4,163,574
4 Jeneponto	4,208,140	5,034,000
5 Takalar	6,149,982	6,350,000
6 Gowa	2,444,802	2,875,000
7 Sinjai	3,108,716	3,107,719
8 Maros	3,677,384	6,500,000
9 Pangkep	8,740,986	9,900,000
10 Barru	5,440,253	5,410,000
11 Bone	2,331,537	2,336,469
12 Soppeng	6,331,166	6,786,895
13 Wajo	6,141,610	8,626,019
14 Sidrap	3,885,895	4,700,000
15 Pinrang	6,558,633	6,275,000
16 Enrekang	2,912,294	5,050,000
17 Luwu	3,563,650	3,560,000
18 Tator	2,198,848	2,219,063
19 Luwu Timur*	11,316,486	12,500,000
20 Luwu Utara	1,118,380	1,118,380
21 Toraja Utara	1,876,603	2,340,000
22 Makassar	11,635,644	13,332,435
23 Pare-Pare	3,127,672	3,300,000
24 Palopo	2,753,845	2,748,560
Jumlah	112,587,770	127,678,114

Tabel 1.7. Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	16,453,937	17,114,368
2	Bulukumba	57,784,711	68,880,821
3	Bantaeng	5,513,573	7,919,809
4	Jeneponto	6,444,032	9,909,800
5	Takalar	16,633,395	63,436,981
6	Gowa	30,604,759	24,040,820
7	Sinjai	26,852,830	32,660,900
8	Maros	17,723,765	19,700,000
9	Pangkep	12,508,447	9,157,608
10	Barru	15,012,848	20,024,577
11	Bone	101,439,912	94,763,709
12	Soppeng	34,241,741	32,103,331
13	Wajo	51,409,100	34,408,720
14	Sidrap	10,877,979	14,693,797
15	Pinrang	65,238,353	65,891,476
16	Enrekang	10,205,541	16,736,588
17	Luwu	18,293,507	14,054,630
18	Tator	13,829,930	11,876,972
19	Luwu Timur*	39,674,821	56,383,693
20	Luwu Utara	107,580,800	48,701,529
21	Toraja Utara	6,818,204	6,020,118
22	Makassar	21,918,998	41,460,000
23	Pare-Pare	79,080,165	79,481,395
24	Palopo	56,100,009	52,488,113
Jumlah		822,241,357	841,909,755

Tabel 1.8. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	547,019,013	584,523,168
2	Bulukumba	751,301,934	810,849,018
3	Bantaeng	493,410,937	527,704,099
4	Jeneponto	637,516,658	674,453,360
5	Takalar	643,331,689	637,130,834
6	Gowa	846,321,528	892,558,037
7	Sinjai	595,871,037	630,657,724
8	Maros	713,906,816	748,453,705
9	Pangkep	724,605,579	767,838,034
10	Barru	540,104,377	574,163,012
11	Bone	1,083,624,984	1,113,186,145
12	Soppeng	635,227,489	672,835,721
13	Wajo	788,802,818	870,905,026
14	Sidrap	609,321,208	656,742,707
15	Pinrang	704,993,385	740,537,033
16	Enrekang	550,815,324	610,604,165
17	Luwu	682,313,624	737,266,902
18	Tator	566,516,703	599,160,119
19	Luwu Timur*	598,656,375	676,436,922
20	Luwu Utara	650,885,088	710,818,862
21	Toraja Utara	558,111,629	570,949,342
22	Makassar	1,251,876,573	1,326,418,487
23	Pare-Pare	480,140,326	492,762,970
24	Palopo	503,736,332	544,436,159
Jumlah		16,158,411,426	17,171,391,551

Tabel 1.9. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	15,361,544	18,835,566
2	Bulukumba	18,542,252	23,447,803
3	Bantaeng	18,691,569	18,545,834
4	Jeneponto	20,224,848	16,680,301
5	Takalar	5,043,060	18,349,965
6	Gowa	17,644,435	17,749,070
7	Sinjai	15,675,957	15,151,628
8	Maros	17,934,034	22,680,169
9	Pangkep	25,534,886	31,390,638
10	Barru	14,989,989	18,612,757
11	Bone	42,246,866	34,064,481
12	Soppeng	19,518,344	22,905,616
13	Wajo	68,384,741	62,289,253
14	Sidrap	20,579,510	21,379,086
15	Pinrang	16,581,731	17,756,911
16	Enrekang	16,743,037	22,543,219
17	Luwu	14,447,858	16,912,750
18	Tator	17,912,474	15,129,237
19	Luwu Timur	52,412,593	52,405,487
20	Luwu Utara	20,625,322	24,683,445
21	Toraja Utara	10,814,207	12,924,702
22	Makassar	85,568,125	93,896,003
23	Pare-Pare	18,169,596	19,172,896
24	Palopo	14,607,988	13,994,019
Jumlah		588,254,966	631,500,836

Tabel 1.10. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	3, 829,426	4,501,902
2 Bulukumba	3,417,136	2,547,284
3 Bantaeng	2,860,547	1,955,924
4 Jeneponto	3,117,887	3,939,787
5 Takalar	8,960,546	1,956,368
6 Gowa	1,749,471	994,159
7 Sinjai	3,251,690	4,669,643
8 Maros	2,947,670	2,229,738
9 Pangkep	3,104,213	2,264,982
10 Barru	3,223,953	2,303,525
11 Bone	4,660,474	3,354,489
12 Soppeng	2,862,849	1,566,581
13 Wajo	25,819,187	30,810,593
14 Sidrap	3,330,538	2,820,914
15 Pinrang	3,079,564	847,500
16 Enrekang	3,053,317	2,764,319
17 Luwu	4,156,296	5,249,819
18 Tator	3,208,826	2,187,052
19 Luwu Timur*	27,829,438	82,699,827
20 Luwu Utara	5,280,554	7,765,516
21 Toraja Utara	12,850,014	1,984,759
22 Makassar	2,860,546	1,955,924
23 Pare-Pare	3,079,425	1,391,331
24 Palopo	3,404,914	2,339,776
Jumlah	141,938,481	175,101,712

T

Tabel 1.11. Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	458,019,013	479,393,610
2 Bulukumba	75,444,820	71,958,260
3 Bantaeng	47,287,960	62,282,910
4 Jeneponto	72,023,040	81,965,820
5 Takalar	565,195,363	554,136,141
6 Gowa	80,227,530	78,736,700
7 Sinjai	55,315,050	69,738,470
8 Maros	78,426,630	78,334,030
9 Pangkep	623,418,990	650,132,194
10 Barru	471,135,015	488,014,810
11 Bone	950,401,934	977,807,065
12 Soppeng	569,126,996	589,049,244
13 Wajo	631,247,160	693,121,100
14 Sidrap	533,655,220	574,364,767
15 Pinrang	629,285,550	654,528,422
16 Enrekang	480,887,270	526,156,287
17 Luwu	595,699,150	624,131,623
18 Tator	486,447,423	510,857,220
19 Luwu Timur*	462,819,314	473,135,918
20 Luwu Utara	573,100,112	601,496,441
21 Toraja Utara	448,417,228	471,481,781
22 Makassar	1,114,853,212	1,198,866,380
23 Pare-Pare	426,405,955	430,750,753
24 Palopo	449,242,430	476,408,524
Jumlah	13,972,903,719	14,684,900,693

Tabel 1.12. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	69,809,030	81,792,090
2 Bulukumba	75,444,820	71,958,260
3 Bantaeng	47,287,960	62,282,910
4 Jeneponto	72,023,040	81,965,820
5 Takalar	64,132,720	62,688,360
6 Gowa	80,227,530	78,736,700
7 Sinjai	55,315,050	69,738,470
8 Maros	78,426,630	78,334,030
9 Pangkep	72,547,490	84,050,220
10 Barru	50,755,420	65,231,920
11 Bone	86,315,710	97,960,110
12 Soppeng	43,719,300	59,314,280
13 Wajo	63,351,730	84,684,080
14 Sidrap	51,755,940	58,177,940
15 Pinrang	56,046,540	67,404,200
16 Enrekang	50,131,700	59,140,340
17 Luwu	68,010,320	90,972,710
18 Tator	58,947,980	70,986,610
19 Luwu Timur*	55,595,030	68,195,690
20 Luwu Utara	51,879,100	76,873,460
21 Toraja Utara	86,030,180	84,558,100
22 Makassar	48,594,690	31,700,180
23 Pare-Pare	32,485,350	41,447,990
24 Palopo	36,481,000	51,693,840
Jumlah	1,455,314,260	1,679,888,310

Tabel 1.13. Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014-2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	87,597,988	98,689,154
2 Bulukumba	237,621,497	297,292,632
3 Bantaeng	87,333,156	109,756,482
4 Jeneponto	120,863,247	178,684,549
5 Takalar	143,039,253	173,204,376
6 Gowa	244,886,023	315,224,546
7 Sinjai	140,719,991	165,601,860
8 Maros	164,081,857	242,053,221
9 Pangkep	171,773,859	225,139,808
10 Barru	108,917,320	166,805,434
11 Bone	295,595,582	414,794,935
12 Soppeng	150,463,113	190,242,690
13 Wajo	215,410,333	217,144,436
14 Sidrap	146,931,153	287,620,928
15 Pinrang	197,855,201	213,554,631
16 Enrekang	151,302,563	144,856,423
17 Luwu	192,699,005	224,613,904
18 Tator	108,351,608	140,529,458
19 Luwu Timur*	270,595,743	281,956,375
20 Luwu Utara	112,062,805	212,170,022
21 Toraja Utara	136,718,349	146,422,291
22 Makassar	646,810,750	762,801,815
23 Pare-Pare	119,871,653	122,468,225
24 Palopo	118,872,504	120,524,087
Jumlah	4,370,374,553	5,443,152,282

Tabel 1.14. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	47,276,369	9,500,000
2	Bulukumba	78,176,561	120,909,864
3	Bantaeng	7,088,466	0
4	Jeneponto	18,828,046	48,791,072
5	Takalar	73,164,497	3,000,000
6	Gowa	215,431,067	39,308,444
7	Sinjai	60,923,730	27,500,000
8	Maros	6,336,571	16,772,000
9	Pangkep	94,276,549	11,116,863
10	Barru	86,120,615	30,945,912
11	Bone	94,495,190	39,140,589
12	Soppeng	66,580,175	21,599,983
13	Wajo	151,174,160	62,627,771
14	Sidrap	1,125,011	32,920,696
15	Pinrang	66,210,017	0
16	Enrekang	23,499,200	65,662,460
17	Luwu	54,880,505	24,968,828
18	Tator	72,108,261	52,661,740
19	Luwu Timur*	176,944,983	153,136,982
20	Luwu Utara	15,397,389	21,720,007
21	Toraja Utara	6,350,806	6,350,806
22	Makassar	240,205,683	255,000,000
23	Pare-Pare	22,415,533	11,053,810
24	Palopo	10,799,535	5,594,100
Jumlah		1,689,808,919	1,060,321,927

Tabel 2.1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	717,495,469	732,028,690
2	Bulukumba	1,156,716,618	1,338,751,514
3	Bantaeng	631,217,547	683,522,948
4	Jeneponto	823,240,111	965,929,127
5	Takalar	936,386,154	911,306,497
6	Gowa	1,455,991,314	1,378,785,523
7	Sinjai	843,919,018	874,461,457
8	Maros	1,002,593,154	1,156,324,126
9	Pangkep	1,119,865,731	1,129,457,157
10	Barru	780,218,669	818,930,372
11	Bone	1,629,142,952	1,710,406,676
12	Soppeng	912,814,998	942,734,583
13	Wajo	1,255,067,683	1,237,023,406
14	Sidrap	822,005,896	1,061,279,869
15	Pinrang	1,062,579,802	1,043,892,404
16	Enrekang	758,072,895	868,334,286
17	Luwu	994,025,579	1,044,231,960
18	Tator	829,482,655	861,809,631
19	Luwu Timur*	1,180,547,937	1,267,033,582
20	Luwu Utara	906,984,528	1,021,448,023
21	Toraja Utara	726,465,743	751,271,304
22	Makassar	2,870,063,431	3,336,367,914
23	Pare-Pare	734,823,286	741,066,560
24	Palopo	715,058,045	746,781,497
Jumlah		24,864,779,215	26,623,179,106

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	303,162,585	382,053,946
2	Bulukumba	581,004,674	685,045,749
3	Bantaeng	304,226,805	375,465,668
4	Jeneponto	425,005,781	516,905,280
5	Takalar	439,864,916	570,301,800
6	Gowa	694,852,204	863,773,895
7	Sinjai	415,282,304	520,492,883
8	Maros	471,203,785	571,951,568
9	Pangkep	572,686,041	551,426,494
10	Barru	393,375,374	492,589,560
11	Bone	954,988,554	1,170,573,955
12	Soppeng	516,767,099	588,738,564
13	Wajo	543,171,787	730,718,330
14	Sidrap	464,176,423	515,554,435
15	Pinrang	532,710,521	618,051,219
16	Enrekang	383,077,668	471,499,593
17	Luwu	492,272,860	622,442,903
18	Tator	405,910,691	511,949,517
19	Luwu Timur*	376,223,437	505,834,178
20	Luwu Utara	425,901,715	546,184,693
21	Toraja Utara	349,743,068	421,434,058
22	Makassar	1,165,467,158	1,368,862,807
23	Pare-Pare	321,614,156	387,741,493
24	Palopo	359,429,801	397,353,830
Jumlah		11,892,119,407	14,386,946,416

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	260,394,469	316,584,559
2	Bulukumba	541,206,391	612,923,721
3	Bantaeng	282,015,706	338,569,659
4	Jeneponto	405,748,421	461,754,893
5	Takalar	423,730,773	540,392,438
6	Gowa	648,253,192	744,118,380
7	Sinjai	398,754,476	491,002,573
8	Maros	443,971,196	518,663,590
9	Pangkep	501,169,201	504,279,499
10	Barru	346,900,553	426,946,254
11	Bone	844,399,547	991,249,927
12	Soppeng	460,276,751	531,623,353
13	Wajo	502,694,682	675,933,957
14	Sidrap	437,988,120	484,768,223
15	Pinrang	487,520,185	578,014,474
16	Enrekang	355,666,711	433,801,845
17	Luwu	429,858,130	521,821,086
18	Tator	376,947,765	427,410,289
19	Luwu Timur*	295,140,419	373,117,548
20	Luwu Utara	384,580,259	448,739,160
21	Toraja Utara	312,358,422	354,465,568
22	Makassar	1,141,996,475	1,334,347,064
23	Pare-Pare	313,219,875	360,835,590
24	Palopo	346,068,474	385,855,523
Jumlah		10,940,860,193	12,857,219,173

Tabel 2.4. Realisasi Belanja Bunga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	0	0
2 Bulukumba	1,252,523	4,000,000
3 Bantaeng	76,944	56,414
4 Jeneponto	0	0
5 Takalar	114,643	0
6 Gowa	0	0
7 Sinjai	0	0
8 Maros	0	0
9 Pangkep	16,778	30,000
10 Barru	3,720,581	5,191,298
11 Bone	1,601,042	3,310,970
12 Soppeng	0	0
13 Wajo	82,640	200,000
14 Sidrap	2,207,840	2,654,000
15 Pinrang	47,851	0
16 Enrekang	0	0
17 Luwu	0	0
18 Tator	83,168	115,000
19 Luwu Timur*	0	0
20 Luwu Utara	0	0
21 Toraja Utara	0	0
22 Makassar	1,967,227	2,500,000
23 Pare-Pare	3,393,912	4,500,000
24 Palopo	7,521,309	3,207,876
Jumlah	22,086,458	25,765,558

Tabel 2.5. Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	0	0
2	Bulukumba	0	0
3	Bantaeng	0	0
4	Jeneponto	0	0
5	Takalar	0	0
6	Gowa	0	0
7	Sinjai	0	0
8	Maros	0	0
9	Pangkep	0	0
10	Barru	0	0
11	Bone	31,909,348	21,641,693
12	Soppeng	0	0
13	Wajo	0	0
14	Sidrap	0	0
15	Pinrang	401,859	500,000
16	Enrekang	0	0
17	Luwu	0	0
18	Tator	0	0
19	Luwu Timur*	0	0
20	Luwu Utara	35,000	40,000
21	Toraja Utara	0	0
22	Makassar	0	0
23	Pare-Pare	0	0
24	Palopo	0	0
Jumlah		32,346,207	22,181,693

Tabel 2.6. Realisasi Belanja Hibah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran
2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	760,000	13,500,000
2 Bulukumba	3,758,919	22,469,150
3 Bantaeng	3,650,000	3,405,000
4 Jeneponto	3,535,385	5,355,000
5 Takalar	1,670,000	2,665,000
6 Gowa	21,919,419	21,000,000
7 Sinjai	4,757,830	4,170,000
8 Maros	4,389,492	16,000,000
9 Pangkep	51,756,690	19,260,000
10 Barru	12,215,005	21,800,000
11 Bone	6,482,500	7,220,000
12 Soppeng	39,366,498	26,757,800
13 Wajo	9,265,944	7,465,000
14 Sidrap	3,923,434	2,360,000
15 Pinrang	22,217,851	4,645,000
16 Enrekang	5,864,648	2,928,000
17 Luwu	24,988,163	4,378,000
18 Tator	8,232,495	14,702,500
19 Luwu Timur*	2,438,794	27,170,000
20 Luwu Utara	7,585,309	12,292,000
21 Toraja Utara	12,957,217	2,524,000
22 Makassar	20,017,466	23,918,000
23 Pare-Pare	4,104,500	5,000,000
24 Palopo	4,844,630	3,500,000
Jumlah	280,702,189	274,484,450

Tabel 2.7. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	0	17,500
2	Bulukumba	1,217,390	955,302
3	Bantaeng	1,808,750	590,000
4	Jeneponto	1,484,787	550,000
5	Takalar	4,175,750	1,000,000
6	Gowa	3,254,987	401,050
7	Sinjai	2000	331,000
8	Maros	1,875,000	3,000,000
9	Pangkep	3,240,023	2,315,100
10	Barru	363,726	500,000
11	Bone	3,349,500	1,280,000
12	Soppeng	1,251,915	0
13	Wajo	15,500	100,000
14	Sidrap	836,660	0
15	Pinrang	292,700	1,350,000
16	Enrekang	3,617,000	4,670,000
17	Luwu	4,952,757	737,500
18	Tator	3,322,308	210,000
19	Luwu Timur*	6,630,915	1,945,670
20	Luwu Utara	15,000	0
21	Toraja Utara	0	0
22	Makassar	672,500	0
23	Pare-Pare	7,000	15,100,000
24	Palopo	448,675	2,950,000
Jumlah		42,834,843	38,003,122

Tabel 2.8. Realisasi Pengeluaran/Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	182,607	1,162,188
2	Bulukumba	2,644,094	3,927,958
3	Bantaeng	1,079,364	1,329,300
4	Jeneponto	0	4,907,000
5	Takalar	385,128	0
6	Gowa	2,320,868	1,675,444
7	Sinjai	358,383	1,493,325
8	Maros	0	0
9	Pangkep	16,237,849	345,312
10	Barru	30,175,509	0
11	Bone	66,375,911	0
12	Soppeng	0	1,961,169
13	Wajo	0	0
14	Sidrap	15,216,192	0
15	Pinrang	369,081	0
16	Enrekang	0	0
17	Luwu	32,223,810	3,974,270
18	Tator	12,454,105	2,100,000
19	Luwu Timur*	7,538,004	8,729,878
20	Luwu Utara	1,219,713	1,677,672
21	Toraja Utara	1,948,910	2,347,604
22	Makassar	0	0
23	Pare-Pare	0	0
24	Palopo	0	0
Jumlah		190,729,528	35,631,120

Tabel 2.9. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	41,445,688	49,789,699
2 Bulukumba	30,188,995	40,269,618
3 Bantaeng	14,441,025	30,515,295
4 Jeneponto	14,237,188	43,338,387
5 Takalar	9,695,622	18,190,989
6 Gowa	19,103,738	96,079,021
7 Sinjai	10,514,695	21,995,985
8 Maros	20,595,447	31,787,978
9 Pangkep	0	24,196,583
10 Barru	0	35,152,008
11 Bone	870,706	144,371,365
12 Soppeng	15,853,446	26,796,242
13 Wajo	30,143,475	45,519,373
14 Sidrap	0	20,772,212
15 Pinrang	21,317,046	31,041,745
16 Enrekang	16,723,812	29,349,748
17 Luwu	250,000	88,532,047
18 Tator	0	65,911,728
19 Luwu Timur*	64,475,305	93,371,082
20 Luwu Utara	32,152,894	82,435,861
21 Toraja Utara	22,478,519	61,096,884
22 Makassar	813,490	1,097,743
23 Pare-Pare	587,084	805,903
24 Palopo	546,713	840,431
Jumlah	366,434,888	1,083,257,927

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	379,821	1,000,000
2 Bulukumba	736,362	500,000
3 Bantaeng	1,155,016	1,000,000
4 Jeneponto	0	1,000,000
5 Takalar	93,000	8,053,373
6 Gowa	0	500,000
7 Sinjai	894,920	1,500,000
8 Maros	372,650	2,500,000
9 Pangkep	265,500	1,000,000
10 Barru	0	3,000,000
11 Bone	0	1,500,000
12 Soppeng	18,489	1,600,000
13 Wajo	969,546	1,500,000
14 Sidrap	4,004,117	5,000,000
15 Pinrang	543,948	2,500,000
16 Enrekang	1,205,497	750,000
17 Luwu	0	3,000,000
18 Tator	4,870,850	1,500,000
19 Luwu Timur*	0	1,500,000
20 Luwu Utara	313,540	1,000,000
21 Toraja Utara	0	1,000,000
22 Makassar	0	7,000,000
23 Pare-Pare	301,785	1,500,000
24 Palopo	0	1,000,000
Jumlah	16,125,101	50,403,373

Tabel 2.11. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	351,403,398	349,974,744
2	Bulukumba	470,523,462	652,705,765
3	Bantaeng	318,404,693	307,884,954
4	Jeneponto	369,218,551	449,023,847
5	Takalar	377,932,220	338,004,697
6	Gowa	580,985,549	515,011,628
7	Sinjai	346,389,136	351,968,574
8	Maros	495,668,798	567,372,558
9	Pangkep	488,567,666	576,330,663
10	Barru	246,211,983	319,840,812
11	Bone	532,011,600	534,285,649
12	Soppeng	324,972,046	348,996,019
13	Wajo	523,802,146	497,105,076
14	Sidrap	348,491,614	542,971,434
15	Pinrang	415,154,530	424,091,185
16	Enrekang	270,780,386	386,834,693
17	Luwu	425,085,965	417,789,057
18	Tator	328,515,151	346,645,170
19	Luwu Timur*	568,917,897	761,199,404
20	Luwu Utara	422,917,205	475,263,330
21	Toraja Utara	355,833,697	326,422,561
22	Makassar	1,440,616,175	1,955,505,107
23	Pare-Pare	293,173,688	347,849,992
24	Palopo	289,034,010	325,392,192
Jumlah		10,584,611,566	12,118,469,111

Tabel 2.12. Realisasi Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	59,732,329	60,905,843
2	Bulukumba	62,685,637	55,960,801
3	Bantaeng	14,200,357	21,022,279
4	Jeneponto	8,748,910	8,751,678
5	Takalar	41,599,755	61,382,574
6	Gowa	20,143,857	21,230,486
7	Sinjai	17,519,037	27,067,021
8	Maros	16,783,821	14,795,703
9	Pangkep	48,060,106	52,819,092
10	Barru	11,387,663	11,816,258
11	Bone	19,035,659	22,042,991
12	Soppeng	51,337,397	44,765,641
13	Wajo	30,652,430	27,389,010
14	Sidrap	43,755,516	52,750,346
15	Pinrang	31,815,859	31,810,667
16	Enrekang	26,110,046	19,229,447
17	Luwu	16,378,673	16,201,432
18	Tator	28,962,927	28,695,174
19	Luwu Timur*	3,368,955	5,387,962
20	Luwu Utara	27,446,654	24,918,508
21	Toraja Utara	19,256,539	16,341,699
22	Makassar	166,856,168	169,039,577
23	Pare-Pare	13,565,806	14,970,824
24	Palopo	49,006,529	58,145,341
Jumlah		828,410,630	867,440,354

Tabel 2.13. Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Dari Belanja Langsung Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya	2014	2015
1 Selayar	122,905,607	127,653,485
2 Bulukumba	188,877,116	277,181,045
3 Bantaeng	180,427,969	206,649,250
4 Jeneponto	210,894,789	236,725,304
5 Takalar	185,411,853	156,769,742
6 Gowa	181,158,379	201,598,270
7 Sinjai	171,381,664	178,383,071
8 Maros	181,062,578	206,804,946
9 Pangkep	134,778,122	198,288,438
10 Barru	114,378,238	153,124,552
11 Bone	303,396,570	302,008,514
12 Soppeng	107,541,315	142,008,093
13 Wajo	222,453,502	214,950,307
14 Sidrap	115,829,872	148,582,311
15 Pinrang	193,223,043	210,019,254
16 Enrekang	130,511,548	176,466,245
17 Luwu	244,385,812	240,517,963
18 Tator	116,060,845	124,388,459
19 Luwu Timur*	243,471,318	300,140,158
20 Luwu Utara	283,189,687	264,216,140
21 Toraja Utara	153,224,616	150,119,081
22 Makassar	810,499,462	1,088,806,055
23 Pare-Pare	182,501,030	194,920,935
24 Palopo	143,604,312	164,491,126
Jumlah	4,921,169,247	5,664,812,744

Tabel 2.14. Realisasi Pengeluaran/Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	168,765,462	161,415,416
2	Bulukumba	218,960,709	319,563,919
3	Bantaeng	123,776,367	80,213,425
4	Jeneponto	149,574,852	203,546,865
5	Takalar	150,920,612	119,852,381
6	Gowa	379,683,313	292,182,872
7	Sinjai	157,488,435	146,518,482
8	Maros	297,822,399	345,771,909
9	Pangkep	305,729,438	325,223,133
10	Barru	120,446,082	154,900,002
11	Bone	209,579,371	210,234,144
12	Soppeng	166,093,334	162,222,285
13	Wajo	270,696,214	254,765,759
14	Sidrap	188,906,226	341,638,777
15	Pinrang	190,115,628	182,261,264
16	Enrekang	114,158,792	191,139,001
17	Luwu	164,321,480	161,069,662
18	Tator	183,491,379	193,561,537
19	Luwu Timur*	322,077,624	455,671,284
20	Luwu Utara	112,280,864	186,128,682
21	Toraja Utara	183,352,542	159,961,781
22	Makassar	463,260,545	697,659,475
23	Pare-Pare	97,106,852	137,958,233
24	Palopo	96,423,169	102,755,725
Jumlah		4,835,031,689	5,586,216,013

Tabel 2.15. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014- 2015
(000 Rp)

Kabupaten/Kotamadya		2014	2015
1	Selayar	62,929,486	0
2	Bulukumba	105.188.482	1,000,000
3	Bantaeng	8.586.049	172,326
4	Jeneponto	29,015,779	0
5	Takalar	118,589,018	3,000,000
6	Gowa	180,153,561	0
7	Sinjai	82,247,578	2,000,000
8	Maros	35,720,571	17,000,000
9	Pangkep	58,612,024	1,700,000
10	Barru	140,631,312	6,500,000
11	Bone	142,142,798	5,547,072
12	Soppeng	71,075,853	5,000,000
13	Wajo	188,093,750	9,200,000
14	Sidrap	9,337,859	2,754,000
15	Pinrang	114,714,751	1,750,000
16	Enrekang	104,214,841	10,000,000
17	Luwu	76,666,754	4,000,000
18	Tator	95,056,813	3,214,944
19	Luwu Timur*	235,406,603	0
20	Luwu Utara	58,165,608	0
21	Toraja Utara	20,888,978	3,414,687
22	Makassar	263,980,098	12,000,000
23	Pare-Pare	120,035,442	5,475,075
24	Palopo	66,594,234	24,035,475
Jumlah		2,388,048,242	117,763,579